



## KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 421.3 / 001 / BPMPTSP

## TENTANG

PERUBAHAN STATUS SMP WANA MULIA DESA LUWE HULU MENJADI  
SMP NEGERI 6 LAHEI BARATKEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO UTARA,

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala SMP Wana Mulia Desa Luwe Hulu Nomor 19/DS-LH/017/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penegerian SMP Wana Mulia Desa Luwe Hulu;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/1134/Dikdas-LB/2016 tanggal 13 September 2016 untuk Persetujuan Penegerian SMP Wana Mulia menjadi SMP Negeri 6 Lahei Barat.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin peningkatan mutu dan standar pendidikan maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan status kelembagaan sekolah;
- b. bahwa SMP Wana Mulia Desa Luwe Hulu sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMP Negeri yang berdiri sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Perubahan status SMP Wana Mulia Desa Luwe Hulu menjadi SMP Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU :

: Perubahan Status SMP Wana Mulia Desa Luwe Hulu menjadi SMP Negeri 6 Lahei Barat.

KEDUA :

: SMP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

1. bertugas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan diberi hak untuk mengelola dan mengatur administrasi pendidikan dan keuangan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan laporan perkembangan pendidikan yang diselenggarakan.
3. bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum 2013.

KETIGA :

: Biaya pelaksanaan kegiatan menyangkut biaya rutin sekolah pada tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

KEEMPAT :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal, 03 Oktober 2016

Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Utara,



**H. IZHAR SAFAWI, SE.,M.I.P**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NP. 19610911 198303 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta  
Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
8. Camat Lahei Barat di Benao.
9. Kepala SMP Wana Mulia di Desa Luwe Hulu
10. Penilik Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh